

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) YANG MELAKUKAN PERALIHAN HAK RUMAH NEGARA GOLONGAN III
(Studi Kasus : Putusan Mahkamah Agung Nomor 119/PK/TUN/2015)

Melki Imbron Nababan¹ dan Ninik Darmini²

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum para pihak dalam mendapat pemenuhan kewajiban dan haknya terkait perjanjian sewa-beli rumah negara, mengetahui dan menganalisis upaya apa yang dilakukan oleh Pensiunan Pegawai negeri Sipil (PNS) untuk mempertahankan haknya, mengetahui dan menganalisis apa saja kendala yang timbul dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban.

Jenis penelitian ini adalah normatif, bahan penelitiannya terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, tersier. Cara memperoleh data dilakukan melalui *library research* yaitu mengumpulkan, menyeleksi, dan meneliti peraturan perundang-undangan, dan buku. Analisis data menggunakan metode kualitatif sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif.

Kesimpulan dari penelitian ini, Pertama, dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini adalah telah benar dan tepat. Hal ini memang dikarenakan penggugat tidak dapat menunjukkan dalam bentuk tertulis perjanjian sewa-beli antara penggugat dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara. Kedua, perlindungan hukum terhadap pensiunan pegawai negeri sipil (PNS) yang melakukan peralihan hak rumah negara golongan III adalah tidak mendapat perlindungan hukum. Untuk mendapatkan perlindungan hukum penggugat tidak cukup mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), namun juga harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN)

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Peralihan Hak, Rumah Negara

¹ Mahasiswa Magister Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (melki.imbron.n@mail.ugm.ac.id)

² Dosen Program S-2 Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (ninik.darmini@mail.ugm.ac.id)

**LEGAL PROTECTION AGAINST THE RETIRED OF CIVIL SERVANTS
WHO CONDUCTING TRANSFER OF STATE HOUSE CLASS III RIGHTS**

(Case Study: Supreme Court Decision Number 119/PK/TUN/2015)

Melki Imbron Nababan³ and Ninik Darmini⁴

ABSTRACT

This study aims to identify and analyze the legal protection of the parties to obtain the fulfillment of the obligations and rights related to the lease-purchase home country, to know and analyze what efforts were made by retired civil servants to defend their rights, to know and analyze what are the obstacles that arise in the context of fulfilling rights and obligations.

The type of research used is normative, the research material consists of primary, secondary, and tertiary legal materials. The method of obtaining data is done through a research library, namely collecting, selecting, and researching laws and regulations, and books. The data analysis used qualitative methods, while deductive conclusions were drawn.

The conclusions of this study are, first, the judge's basic considerations in deciding this case are correct. This is because the plaintiff was unable to show a written lease-purchase agreement between the plaintiff and the Regional Government of North Sumatra Province. Second, legal protection for retired civil servants who transfer their state house class III rights is not legally protected. To obtain legal protection, the plaintiff is not sufficient to file a lawsuit at the State Administrative Court, but also must file a lawsuit at the District Court.

Keywords: Legal Protection, Transfer of Rights, State House

³Mahasiswa Magister Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (melki.imbron.n@mail.ugm.ac.id)

⁴Dosen Program S-2 Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (ninik.darmini@mail.ugm.ac.id)